



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOSUA DECARDO SIREGAR**
2. Jabatan : **STAF**
3. NHK : **181065**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
2. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000.000
4. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/140 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, WARISAN Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 835.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA E Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO X Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER G 2.8/ AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 595.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 95.043.825

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. 330.493.500

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 389.053.772



F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.050.136.357
Sub Total	Rp.	12.549.727.454
III. HUTANG	Rp.	118.343.313
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.431.384.141

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.